

PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN INDONESIA (Sebuah Tuntutan Perubahan Peradaban Bangsa)

Yulius Rustam Effendi

Abstract:

The most voluptuous BREAKTHROUGH at century 21 happened not only because of the technology, but also because of the growth of the concept about what is the meaning of becoming a human being. The Existence of human being deals always with a rich "possibility" and "actuality". Human being who is always in the process of "becoming" can only happen through a steady process of education. The demand of an urgent process of education aiming at universal human building through certain evolution emerges all the time. Human being is never considered not only as "being" but also as "becoming, a motion, a process, and transition, which really never ends. Essentially education deals with human attainment of human being. Education in this case assist the paradigm shift and facilitate the process of being in solidarity even though there is a lot of limitations (Naisbitt & Aburdene, 1990: 10). In the light of this point of view education cannot be comprehended except as cultural endeavour for the shake of a civil society. Hence the permanent and real solution for the complexity of the problems of our nation is how to invest properly and correctly the human resources more than any other superficial way out.

Kata kunci: pembudayaan, pendidikan, indonesia

I. PENDAHULUAN

"Jika anda ingin hidup untuk setahun tanamlah padi dan jagung, jika anda ingin hidup untuk puluhan tahun, tanamlah kelapa, tetapi jika anda ingin hidup untuk selama-lamanya, tanamlah pendidikan yang baik pada generasi muda." "Jika Anda ingin menang untuk setahun asahlah pedang, tombak dan panah Anda, tetapi jika Anda ingin menang untuk selama-lamanya, asahlah budi dan nurani generasi muda."

Urgensitas pendidikan bagi bangunan kemanusiaan universal, hadir dalam keseluruhan proses evolusi yang melewati dua tahapan. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan "hominisasi" yaitu munculnya kesadaran refleksi diri kemanusiaan. Eksistensi kemanusiaan pada tahapan ini merupakan suatu evolusi, tetapi masih menjadi evolusi yang belum berakhir. Ada tahapan lanjutan, yang dapat disebut "humanisasi" atau tahapan "pembudayaan". Pada tahapan ini, manusia terus-menerus mengembangkan diri dengan mengembangkan apa yang disebut kebudayaan. Kedua tahapan ini seyogyanya dinilai bukan karena perkembangan teknologi sebagai

bentuk terobosan yang paling mengalirahkan pada abad ke 21, tetapi karena perkembangan konsep mengenai apa artinya menjadi manusia. Proses evolusi pada tahapan ini, mengikhtarkan bahwa sejauh manusia merupakan makhluk budaya, yang hanya dapat menyempurnakan diri dengan membudaya, maka pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas membudaya. John Dewey menegaskan bahwa pendidikan merupakan hakikat hidup untuk dapat melangsungkan keberadaannya. Keberlangsungan hidup ini hanya dapat dijamin dengan perbaruan terus-menerus, melalui transmisi dan komunikasi budaya secara kritis.¹

Transmisi dan komunikasi secara kritis mengamini tujuan pendidikan sebagai proses pembebasan dan pengangkatan manusia dari kondisi-kondisi *sub-human* kepada kondisi *human*, yang mencakup kondisi-kondisi standar manusiawi, seperti; biologis, sosiologis, moral dan iman (tingkat minimal). Efek langsung dari proses pembebasan dan pengangkatan manusia membawa bias pembentukan, pematangan (internalisasi/pembatinan), pemberdayaan dan pembiasaan potensi-potensi intelek, moral, psikis dan iman berdasarkan standar sosio-budaya universal atau lokal baik secara formal maupun non-formal atau informal, sehingga pikiran, perasaan, kehendak dan tindakan/tingkah laku dari individu (peserta didik) terarah secara tepat dan benar (tingkat maksimal).

Mengakar pada upaya pembebasan dan pengakatan manusia dari kondisi *sub-human* kepada kondisi *human*, mengokohkan pendidikan pada tiga (3) kepentingan dasariah manusia. Pertama, pendidikan bertujuan agar manusia mampu menguasai lingkungannya (mengubah, mencipta, dan menciptakan kembali dunianya) melalui ilmu dan teknologi. Pengokohan kepentingan dasariah ini, memunculkan kebebasan dan kreativitas manusia sebagai *co-creator*. Manusia dapat menggunakan ilmu dan teknologi untuk mendukung keberadaannya, tetapi dapat juga menghancurkan bangunan keberadaan manusia itu sendiri. Fenomena ini menjelaskan ambiguitas eksistensi peran manusia terhadap pengimplementasian potensi diri. Karena itu, pendidikan etika profesi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan ilmu dan teknologi sebagai perisai pengaman.

Kedua, pendidikan membantu mengaktifkan wilayah komunikasi sehingga mengejawantakan keberadaan manusia sebagai *homo sociale*. Komunikasi yang dibangun, bukan saja komunikasi dengan sesama pada periode waktu

¹ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The Free Press, 1909), p. 48

masa kini, melainkan juga komunikasi dengan generasi masa lampau, (belajar dari sejarah dan tradisi). Membangkitkan konsientisasi historis berarti mengangkat titik stimulus bawah sadar bahwa manusia itu produk sejarah dan pencipta sejarah. Identitas sebagai kelompok dan sebagai bangsa perlu ditransformasi ke arah yang lebih dinamis, sehingga menimbulkan perubahan dan perkembangan yang terus-menerus, dan mengarah pada ketegangan antara tradisi dan reformasi serta komunikasi masa depan, sebagai proyek kemajuan peradaban. Pengaruh yang ditimbulkan dari kemajuan peradaban memosisikan pengajaran "humaniora" pada posisi penting sebagai mediasi tradisi. Ketiga, pendidikan membiasakan orang untuk menjadi kritis terhadap berbagai determinisme dan tindakan otoritarian dan totalitarian, karena itu kritik ideologi menjadi bagian penting dari pendidikan.

Selanjutnya persoalan rapuhnya wajah pendidikan nasional di Indonesia, jika ditelisik secara akurat pada setiap periodisasi pencaharian model dan bentuk pendidikan nasional, ditemukan tiga masalah pokok yang harus segera dibenahi, yaitu kondisi sosial, pembentukan manusia, dan perangkat UU. Persoalan kondisi sosial yang dimaksud mengarah pada proses investasi dan re-investasi yang terjadi dalam dunia industri yang berlangsung sangat cepat, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada organisasi kerja, struktur pekerjaan, struktur jabatan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sejalan dengan praktek pendidikan, akibatnya *mismacth education and employmen* cenderung semakin membesar. Dengan demikian muncul kesenjangan okupasional, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pendidikan dalam hal ini bergeser dari ide *back to basic* ke arah ide *the forward to future basic*, yang mengandalkan pada peningkatan kemampuan TLC (*how to think, how to learn and how to create*). *How to think* menekankan pada pengembangan *critical thinking*, *how to learn* menekankan pada kemampuan untuk bisa secara terus-menerus dan mandiri menguasai dan mengolah informasi, dan *how to created* menekankan pada pengembangan kemampuan untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang berbeda-beda.

Masalah pembentukan manusia mengarah kepada makna pendidikan bagi manusia. Hakikat manusia pada dasarnya menentukan wawasan pendidikan, dan eksistensi manusia menentukan landasan penyelenggaraan pendidikan.² Logikanya, jika tidak ada manusia, pendidikan tidak mungkin

2 Dick Hartoko, *Menjadi Manusia Pembelajar* (Jakarta: Kompas, 1989), p. 34.

ada, dan jika tidak ada pendidikan, mustahil manusia bisa menjaga dan apalagi mengembangkan kelangsungan kehidupannya. Antara manusia dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, dan berada dalam sistem hubungan integral-kausalistik. Atas dasar hubungan ini, maka dapat disusun landasan penyelenggaraan pendidikan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Mangunwijaya, pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, jika pendidikan dapat menghantar dan menolong peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi-potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa, dan utuh; secara intelektual, secara moral (jati diri dan citra diri yang semakin utuh, harmonis, dan integral), sosial, spiritual, dan memiliki ketrampilan dalam pemaknaan hidup (*life-skills*).³ Demikian juga dengan Ki Hajar Dewantara selaku perintis pendidikan Nasional Indonesia menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan saja menargetkan peserta didik yang pandai, tetapi terutama menjadi pribadi yang bernilai moral dan berakal. Bernilai moral dibahasakan oleh Mangunwijaya sebagai keutamaan moral.⁴ Keutamaan moral merupakan ciri-ciri keluhuran watak manusiawi yang secara moral layak dan pantas diajarkan kepada setiap manusia dan dengan demikian menjadi cita-cita yang layak dan pantas untuk ditanamkan. Keutamaan moral meletakkan tekanan dan fokus perhatian pada peningkatan kualitas watak atau mutu pribadi si pelaku moral (peserta didik), melalui penginternalisasian pengetahuan hingga tataran pencerdasan berperilaku.⁵

Pembahasan ini sangat mendesak, mengingat basis pendidikan masa depan terarah pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu diharapkan pengakaran pendidikan membantu pribadi untuk secara dewasa dalam kematangannya membentuk pribadi yang kritis, analitis, moralis dan bernurani teguh. Arti terberi yang hendak dimaknai adalah membuat agar perkembangan hidup seseorang atau sekelompok orang menjadi sempurna, jasmani-rohani dan membuat bangsa ini menjadi cerdas baik aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Berikut ini gambaran makna ketercapaian insan Indonesia yang cerdas (komprehensif dan kompetitif).

3 Mangunwijaya, *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang* (Surabaya: Usaha Nasional, 2007), p. 73.

4 Ibid., p. 87.

5 Williams, *Planning Succesful Employee Performance* (terj. Ramelan), (Jakarta: PPM, 1989), p. 24.

INSAN CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF			
MAKNA INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF		MAKNA INSAN INDONESIA CERDAS KOMPETITIF	
A. Cerdas Spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan 2. Bersemangat juang tinggi 3. Mandiri 4. Pantang menyerah 5. Pembangun dan pembina jejaring 6. Bersahabat dengan perubahan 7. Inovatif dan menjadi agen perubahan 8. Produktif 9. Sadar mutu 10. Berorientasi global 11. Pembelajar sepanjang hayat
B. Cerdas Emosional dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya 2. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: <ul style="list-style-type: none"> a). membina dan memupuk hubungan timbal-balik b). demokratis c). empati dan simpati d). menjunjung tinggi hak asasi manusia e). ceria dan percaya diri f). menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta g). berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban berwarga negara 	KOMPETITIF	
C. Cerdas Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memeroleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, analitis, dan imajinatif 		
D. Cerdas Kinestetis	<p>Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, dan terampil</p> <p>Aktualisasi insan yang adiraga</p>		

Tabel 1: pencapaian pendidikan karakter

Ketiga, kepastian perangkat Undang-Undang (UU). perangkat UU yang cenderung dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu

menjerumuskan hakikat pendidikan pada politisasi pendidikan. Tarik ulur penetapan UU pendidikan pada tataran pengambil kebijakan sesungguhnya memberikan sinyal bahwa UU yang dihasilkan bukan untuk kepentingan pendidikan yang mendesak, tetapi UU yang dihasilkan demi kepentingan pendidikan yang mendatangkan keuntungan melalui politisasi pendidikan. Dengan demikian pemberlakuan UU pendidikan bukan merupakan target pencapaian pendidikan, tetapi pemberlakuan UU dinilai sebagai target pencapaian politik melalui pendidikan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa UU pendidikan bukan ditargetkan untuk mengokohkan jalannya proses pendidikan yang benar, tetapi UU pendidikan ditargetkan untuk mengokohkan tujuan politis dalam bingkai pemberian pendidikan yang rapuh.

Untuk mencapai referensi solutif pengukuhan UU pendidikan tidak ada cara lain selain mengembalikan tujuan pengukuhan UU pendidikan pada paradigma baru yang spesifik dalam arti menunjuk pada gugus kompetensi konkret tertentu. Kemampuan untuk memanajemen perubahan, melakukan analisis dan sintesis sehingga menghasilkan konkretisasi aplikatif atas kondisi kekinian dan kemasa depanan program pendidikan itulah yang dimaksudkan dengan paradigma baru pendidikan.

Sehubungan dengan ini, kepastian UU sangat penting. Kepastian UU mencakup dua hal. Pertama, adalah kepastian makna, artinya UU pendidikan itu dirumuskan sekian sehingga maknanya jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Kedua, kepastian pelaksanaan UU pendidikan, artinya negara menjamin bahwa UU itu sungguh dilaksanakan sehingga tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut agar UU itu dipenuhi dan pelanggarannya ditindak dan dikenakan sanksi menurut UU tersebut. Sebuah rumusan hukum yang bagus tanpa kepastian pelaksanaan akan sia-sia, dan efek baliknya mengakibatkan jatuhnya kewibawaan UU tersebut.

II. PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN

Scheler dan Heidegger mengemukakan bahwa "tidak ada zaman seperti zaman sekarang, dimana manusia menjadi pertanyaan bagi dirinya sendiri atau menjadi masalah bagi dirinya. Tidak ada pula zaman dimana di tengah kemajuan yang pesat, manusia paling kurang mengenal diri dan identitasnya". Pertanyaan retoris yang bernada gugatan dalam hal ini yaitu apa yang sedang menggerogoti dunia hunian ini? Apakah dunia ini telah

dikepung oleh bayang-bayang kehancuran? Jika diprediksi melalui cakrawala auktarung-nya Naisbitt dan Aburdene ditemukan sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa: 'kita kini sedang dilanda krisis kemanusiaan, krisis yang terjadi bagaikan pencuri yang mencuri di rumah sendiri, karena ia tidak memiliki musuh. Musuh kita adalah pergulatan ambisi kekinian yang lupa berpaling ke masa lampau. Mata dimana seluruh kebetadaannya telah dilis dengan pembentukan kesejadian hidup akan hakikat, tabiat, tujuan, norma-norma yang dijunjung dalam kehidupan bersama'.

Nilai-nilai yang membangun relasi manusia dengan alam, manusia dengan identitas dirinya, dan manusia dengan identitas kelompoknya. Namun, sadar atau tidak, suka atau atau tidak suka, ternyata kondisi yang dialami manusia saat ini merupakan produk hasil pikir masa kini yang tidak bersenyawa dengan produk hasil pikir masa lalu, terutama dalam visi dan perspektif kehidupannya. Seluruh spektrum sejarah masa lalu yang telah menjadi lahan garapan masa kini, berupa pola kepercayaan, pola berpikir sangat kasat indera sedang menghadapi risiko. Risiko yang paling banter adalah dekonstruksi pendidikan masa kini. Terimplisit di dalamnya ambigiusitas arah pendidikan untuk membangun kesadaran sejarah dan kemampuan merandang segala persoalan secara dialektik, sehingga manusia yang menghuni dunia ini tidak tahu lagi menata masa depannya.

Masyarakat bangsa ini sering menggerutu karena korupsi yang merajalela, pelanggaran norma-norma dan hukum yang mengalir bagai air keruh tanpa penyaring. Selaku penegak hukum malah berbalik melanggar norma-norma dan hukum. Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sangat santun dan beradab, menjadi beringas dan saling menuding. Persatuan dan kesatuan yang semula diagungkan, digelontor gelombang kepentingan kelompok. Fakta-fakta yang ada seyogyanya mengamini fenomena kehancuran bangsa ini. Akhlak dan martabat bangsa ini semakin merosot. Sebagai sebuah entitas, bangsa ini terancam eksistensinya, harga diri bangsa ini sedang diambang pintu kehancuran, kalau tidak mau dikatakan, tunggu waktunya untuk tidak punya harga diri lagi (tidak bermartabat).

Karut-marut kehidupan bangsa saat ini, telah diprediksi oleh Theodore yaitu bahwa hampir semua konflik yang penuh kekerasan selama dasawarsa 1990-an, terjadi di Negara yang baru mengalami kebebasan politik, perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan pers.

Konflik yang dimaksud memuncak ketika gelombang transisi ke arah demokrasi juga memuncak. Bukankah suatu kebetulan semata bahwa Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama. Namun, tidak bisa dinafikan juga bahwa dalam perjalannya, hampir setiap bangsa mengalami *never ending development process*. Salah satu tawaran agar proses ini berkembang ke arah pembentukan perilaku manusia yang baik adalah melalui pengimplementasian pendidikan yang berwajah ke-Indonesia-an dalam bingkai revolusi mental anak bangsa. Sudah saatnya pendidikan yang diwarnai kekerasan yang mereduksi peserta didik menjadi objek, bukan lagi menjadi metode pendidikan yang konstruktif.

Revolusi mental yang dimaksud dipertegas oleh Sonhadji yaitu bahwa pendidikan dibangun dengan tujuan untuk membantu manusia menjadi semakin manusiawi. Atas dasar ini, manusia sebagai *animal educandum* dan *animal educandus*, perlu melatari sejarah kemanusiaan sebagai sejarah perkembangan peradaban. Pada tataran ketercapaian formatum pendidikan yang berubah wajah ini, pendidikan tidak bisa lain kecuali dipahami sebagai ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Dalam *ke-diri-an* manusia tercipta karsa dan rasa sebagai makhluk "historis". Eksistensi manusia, bukan saja sebagai lahan garapan posibilitas melainkan aktualitas, bukan saja *being* tetapi *becoming*. Ikhtiar pendidikan sebagai prakarsa yang meliputi proses pengalihan pengetahuan dan ketrampilan, serentak pula menjembatani proses pengalihan nilai-nilai budaya.

Jika benar demikian, maka solusi permanen yang paling masuk akal guna mengatasi kompleksitas problematika bangsa ini, bukanlah terletak pada proses alamiah demokratisasi dengan segala dinamika dan rekayasa politisnya, melainkan bagaimana menginvestasikan sumber daya manusia melalui pendidikan secara benar. Penting untuk disadari, bahwa investasi sumber daya manusia tidak bisa instan, tetapi dibutuhkan keberanian pemasukan pola pikir dan kebijakan pemimpin generasi lama dan kini untuk diformat pada generasi masa depan sebagai *reformative generation* (generasi reformasi). Pembaharuan yang diharapkan hanya bisa terjadi melalui mereka yang berakar dalam tradisi, dan tradisi yang sejati hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang mampu membuat perubahan.

Jelagah harapan pendidikan angkatan reformatif membawaikan generasi yang bisa hidup sejahtera dan lebih memiliki prestise hidup, menghargai

harmoni kemanusiaan dan kedamaian, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan kultural, dan berjiwa demokratis. Inilah seyogyanya wajah pembudayaan pendidikan ke-Indonesia-an, yang ditandai oleh kesadaran dan keyakinan bahwa setiap individu dan kelompok etnis itu unik, namun dalam keunikannya masih-masing memiliki kebenaran dan kebaikan universal. Demikian halnya desain kurikulum hendaknya tertuju pada upaya membangun sikap asertif dan komunikatif. Melalui cara ini desain kurikulum berkembang melampaui reformasi kurikulum menjadi transformasi unsur dalam sistem pendidikan.

Reformasi pendidikan yang mesti dibangun di sini adalah pengembangan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, dan pengembangan sikap *culture responsive*, serta keahlian dalam pengolahan resolusi konflik. Pada tataran ini reformasi pendidikan membantu membangkitkan kembali kesadaran nilai kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan memiliki kesadaran kritis tentang kebudayaan itu sendiri. Bentangan ikhwatil pembudayaan pendidikan yang berwajah ke-Indonesia-an ini, hendaknya menjadi latar untuk memahami jalinan yang tak terpisahkan antara ikhtiar pendidikan dan kebudayaan demi perkembangan peradaban bangsa. Garapan horizon bathin ini mengikhtiaran, bahwa pendidikan yang berwajah ke-Indonesia-an mempunyai makna istimewa yaitu oleh dan melalui pendidikan yang berwajah baru, tercipta komunitas persaudaraan yang memerhatikan kepentingan semua pihak.

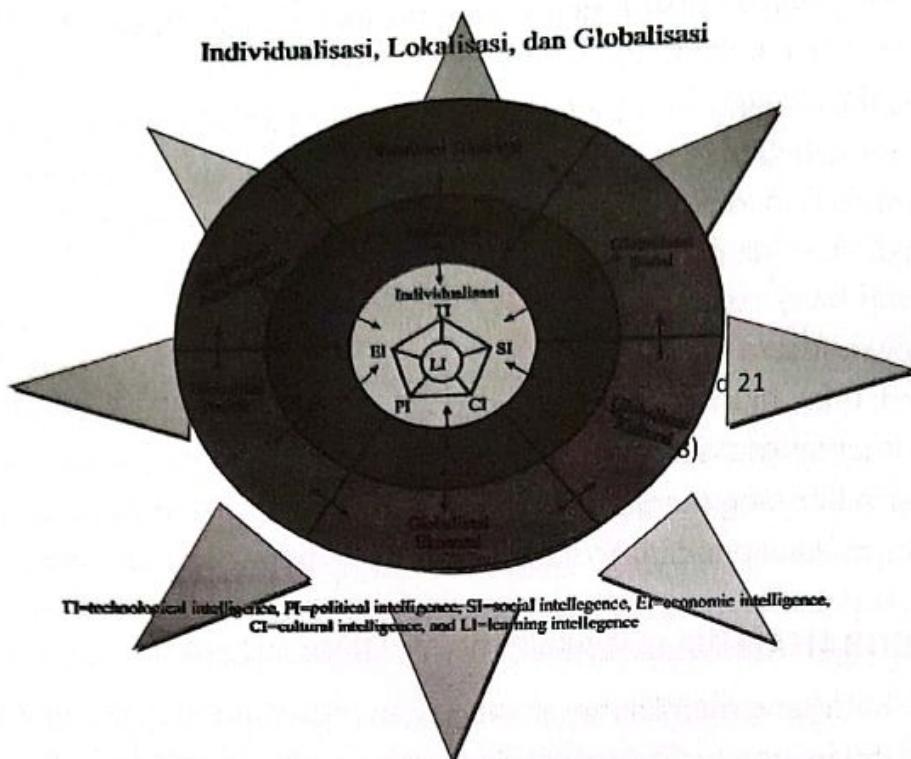
Pengejawantahan pendidikan yang menekankan nilai persaudaraan bukan saja mengokohkan makna demokrasi yang telah dibangun, tetapi konsep pendidikan itu sendiri harus demokratis. Demokrasi dalam hal ini merupakan suatu proses yang mengimplikasikan beberapa prinsip politik modern, yaitu keadilan rakyat, partisipasi, akuntabilitas, kontrol sosial, toleransi terhadap kemajemukan, persamaan kewarganegaraan dan pembatasan ruang lingkup politik. Pada tataran pencerahan, pokok kajian pendidikan humaniora mengakar-tunggal jejaring inti proyeksi imajinatif manusia melalui pengembangan empati dan toleransi. Prototipe proyeksi imajinatif ini membangkitkan dinamika manusia masa lampau, untuk digubah ke dalam syair lagu pendidikan masa kini, sehingga di masa depan ia tampil bagi "jendela zaman" tempat angin perubahan zaman menembus masuk ke dalam hati manusia zaman yang telah cerah budi dan cerah nurani.

Hembusan angin perubahan inilah yang menurut penulis dipandang sebagai inti dimensi peradaban.

Peradaban yang berisi nilai pembudayaan dalam isi dan proses serta praksis pendidikan. Penginternalisasian dimensi ini menjadi landasan dasar pembentukan manusia pembudaya yang memberi arti penting pada proses dialektika melalui pembentukan afeksi kemanusiaan seperti; tidak cepat meradang hanya oleh persoalan kecil; tidak mudah beringas hanya karena kesumpekan cara berpikir; tidak gampang korup hanya karena tergiur ekonomi; tidak mudah berkhianat manakala dipercaya; dan tidak semaunya sendiri "memangsa" sesama hanya karena kepentingan dan interes tertentu. Dimensi inilah yang menjadi akar pembentukan peradaban bangsa. Dengan kata lain, melalui pendidikan yang benar kita selamatkan Indonesia.

III. PERUBAHAN WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA

Kata yang memiliki kesan magis dan misterius untuk mengkritisi ilmu pengetahuan atau praktek pendidikan di era global ini tidak lain adalah kata *change*. *Change* sebagai suatu gerak perubahan dalam bidang pendidikan (*change of education*) sangat penting. Pada tahun 1972, UNESCO melalui *The International Comission for Education Development* mengingatkan bangsa-bangsa, bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, maka harus dimulai dari pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Kunci ini dipakai untuk bersaing dalam perkembangan global baik di bidang teknologi, sosial, ekonomi, politik, pembelajaran maupun kultural. Persaingan di era global ini perlu disadari dalam cakupan tingkatan proses individualisasi menjadi lokalisasi dan bermuara pada globalisasi.



Gbr. 1 Roda Perkembangan abad 21

(Sumber: Sondhaji, 2008)

Perkembangan di era global ini seyogyanya membangkitkan manusia pada tingkat konsientisasi diri untuk mempersiapkan diri memasuki abad 21 yang dikenal dengan abad pengetahuan. Para peramal masa depan (*futurist*) mengemukakan bahwa abad 21 sebagai abad pengetahuan karena pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan. Abad pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, psikologi, dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah perubahan cara pandang manusia terhadap manusia, pendidikan, perubahan peran orang tua, guru, dosen, serta perubahan pola hubungan antara komponen-komponen yang ada.

Dasar utama perhatian di bidang pendidikan pada abad 21 bertujuan untuk mempersiapkan hidup dan kerja bagi masyarakat. Kini saatnya menoleh sejenak ke arah pandangan dengan sudut yang luas mengenai peran-peran

utama yang dimainkan oleh pembelajar dan pendidik dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Sejalan dengan pandangan di atas, Naisbit mengemukakan 10 (sepuluh) kecenderungan besar yang akan terjadi dalam dunia pendidikan di abad 21 yaitu kecenderungan perubahan: 1) dari masyarakat industri ke masyarakat informasi (globalisasi sosial), 2) dari teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi (globalisasi teknologi), 3) dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia (globalisasi ekonomi), 4) dari perencanaan jangka pendek ke perencanaan jangka panjang (globalisasi sosial), 5) dari sentralisasi ke desentralisasi (globalisasi politik), 6) dari bantuan institusional ke bantuan diri (globalisasi kultural), 7) dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris (globalisasi politik), 8) dari hierarki-hierarki ke penjaringan (globalisasi sosial), 9) dari utara ke selatan (globalisasi sosial), dan 10) dari atau/atau ke pilihan majemuk (globalisasi sosial dan budaya).

Berbagai implikasi kecenderungan di atas berdampak pula dalam dunia pendidikan khususnya pada aspek kurikulum, manajemen pendidikan, tenaga kependidikan, strategi dan metode pendidikan. Implikasi kecenderungan lain dikemukakan Naisbit dalam sembilan (8) kecenderungan besar di Asia yang ikut memengaruhi dunia yaitu: a) dari negara bangsa ke jaringan (globalisasi sosial dan politik), b) dari tuntutan eksport ke tuntutan konsumen (globalisasi ekonomi), c) dari pengaruh Barat ke cara Asia (globalisasi kultural), d) dari kontrol pemerintah ke tuntutan pasar (globalisasi politik dan ekonomi), e) dari desa ke metropolitan (globalisasi kultural), f) dari padat karya ke teknologi canggih (globalisasi teknologi), g) dari dominasi kaum pria ke munculnya kaum wanita (globalisasi kultural dan sosial), h) dari Barat ke Timur (globalisasi kultural), i) dari pendekatan konvesional ke pendekatan berbasis masalah dan saintific (globalisasi pembelajaran).

Kedelapan kecenderungan itu akan memengaruhi tata nilai dalam berbagai aspek, pola dan gaya hidup masyarakat baik di desa maupun di kota. Kondisi ini memengaruhi pola-pola pendidikan, sehingga pendidikan ditantang untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan kecenderungan itu tanpa kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsanya.

Mengkritisi pendapat Naisbit di atas, ditemukan karakteristik potret wajah pendidikan Indonesia di abad 21 sebagai berikut: (1) pendidikan

nasional mempunyai tiga fungsi dasar yaitu: (a) mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang diperlukan dalam proses industrialisasi, (c) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) sebagai negara kepulauan yang berbeda-beda suku, agama dan bahasa, pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan saja, akan tetapi mempunyai fungsi pelestarian kehidupan bangsa dalam suasana persatuan dan kesatuan nasional; (3) meningkatnya hasil pembangunan, mobilitas penduduk akan memengaruhi corak pendidikan nasional; (4) perubahan karakteristik keluarga baik fungsi maupun struktur, akan banyak menuntut pentingnya kerja sama berbagai lingkungan pendidikan dan dalam keluarga sebagai intinya; nilai-nilai keluarga hendaknya tetap dilestarikan dalam berbagai lingkungan pendidikan; (5) asas belajar sepanjang hayat harus menjadi landasan utama dalam mewujudkan pendidikan untuk mengimbangi tantangan perkembangan zaman; (6) penggunaan berbagai inovasi Iptek terutama media elektronik, informatika, dan komunikasi dalam berbagai kegiatan pendidikan, (7) penyediaan perpustakaan dan sumber-sumber belajar sangat diperlukan dalam menunjang upaya pengembangan pendidikan; (8) publikasi dan penelitian dalam bidang pendidikan dan bidang lain yang terkait, merupakan suatu kebutuhan nyata bagi pendidikan di abad pengetahuan.

Pendidikan di abad pengetahuan menuntut adanya manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua/masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah sosok penampilan guru yang ditandai dengan keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan ketaqwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesionalisme, kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin, wawasan masa depan, kepastian karir, dan kesejahteraan lahir batin.

Pendidikan mempunyai peranan yang amat strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai mega-*skills* yang mantap. Atas dasar ini lembaga pendidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan

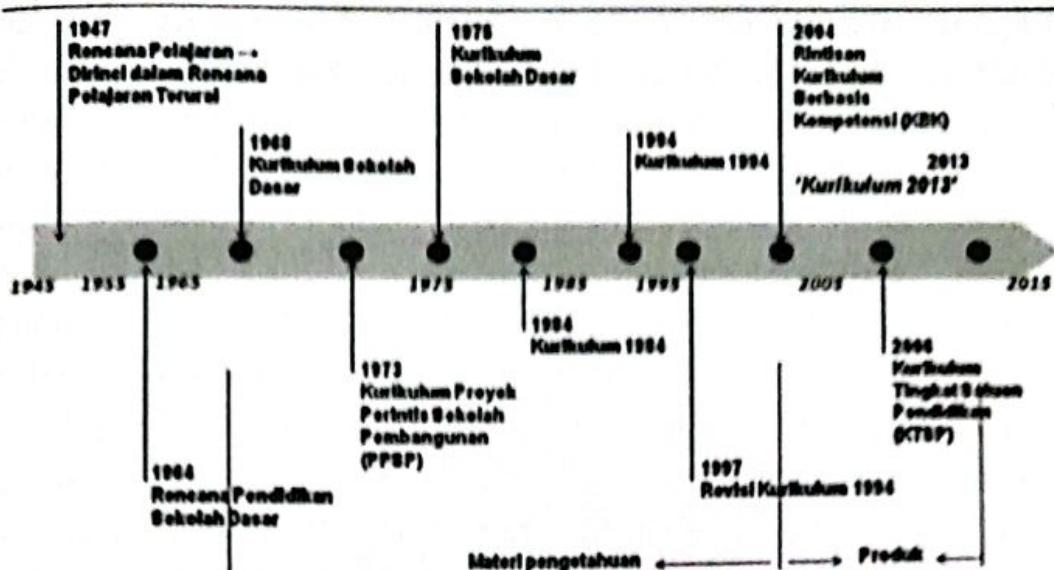
pencerahan dan pemberdayaan dalam berbagai aspeknya. Makaglansar mengemukakan bahwa memasuki abad 21 pendidikan akan mengalami pergeseran perubahan paradigma yang meliputi pergeseran paradigma: (1) dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat, (2) dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik, (3) dari citra hubungan guru-peserta didik yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kermitraan, (4) dari pengajar yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai, (5) dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye melawan buta teknologi, budaya, dan komputer, (6) dari penampilan guru yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja, (7) dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kerja sama. Sejalan dengan pencerahan pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan yang bersifat kompetitif.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat negara-negara maju memberi prioritas dengan mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, serta mengadakan pembaruan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif. Negara-negara maju menyadari bahwa investasi yang besar di bidang pendidikan tentu menghasilkan *high rate of return* di masa depan. Implementasi ketercapaian *high rate of return* sebagai sebuah investasi kemanusiaan masa depan, mendesak pemerintah yang adil menyediakan pendidikan bermutu bagi seluruh warganya tanpa kecuali. Namun, "keadilan" ini belum dapat diwujudkan pemerintah Indonesia karena belum sanggup memuaskan hak dasar atas pendidikan warganya. Ironisnya, pemerintah Indonesia tidak mampu memenuhi kewajiban utamanya, menyediakan pendidikan bagi rakyat bahkan cenderung memperlihatkan sikap arogan yang tidak masuk akal dengan cara membuat berbagai peraturan yang mempersulit dan menghambat perkembangan pendidikan.

Seperti badai *tsunami* atau *tornado*, *change of education* di Indonesia memunculkan kenyataan yang begitu aneh (*strange*). Sebagai suatu gerak perubahan, pendidikan Indonesia menjadi fenomena yang membingungkan untuk didiskusikan. Kebingungan ini ditandai dengan peksanaan Ujian Nasional (UN) yang dipakai sebagai penentu kelulusan peserta didik, serta penambahan jumlah mata pelajaran yang di-UN-kan, kini menjadi kenyataan

yang memprihatinkan. Guru-guru di sekolah juga bingung mempersiapkan peserta didik. Program bimbingan pun terkesan membingungkan, dengan menggunakan metode *drilling* soal. Peserta didik dibuat tambah bingung lagi, karena mereka hamplir tidak punya waktu senggang. Kebebasan dalam pembelajaran yang menyenangkan tidak dirasakan lagi. Kemerdekaan kemanusiaan mereka telah dicabut secara paksa. Dalam kebingungan yang sama, aksi protes peserta didik pun tidak bisa dibendung dan menjadi panorama yang sungguh memprihatinkan. Sekilas terkesan pendidikan di Indonesia menjadi momok yang membingungkan, karena telah kehilangan orientasi (*future oriented*).

Neverending process dari seluruh perubahan format pendidikan Indonesia, terkesan masih bahan mentah dari hasil jiplakan, sehingga meskipun dibuat perubahan terus-menerus, hasilnya pun semakin membingungkan, malah semakin jauh dari konteks ke-indonesia-an (budaya, cara berpikir, cara berprilaku). Otonomisasi pendidikan yang telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 telah digerus oleh muatan kepentingan. Gonta-ganti kurikulum yang hanya beda nama tetapi isinya sama, benar-benar hanya mengejar "proyek" atas nama kurikulum. Alhasil pada tataran praksis, "proyek" atas nama kurikulum ini mengalami ambiguisitas-pedagogik yang "prematur". Kurikulum pendidikan yang diterapkan kemudian berjalan "*mengangkang*" pada tiga pilar standar kurikulum (2004, KTSP, dan 2013) tanpa tumpuan dan target pasti pada satu sistem kurikulum pendidikan yang berwajah Indonesia.

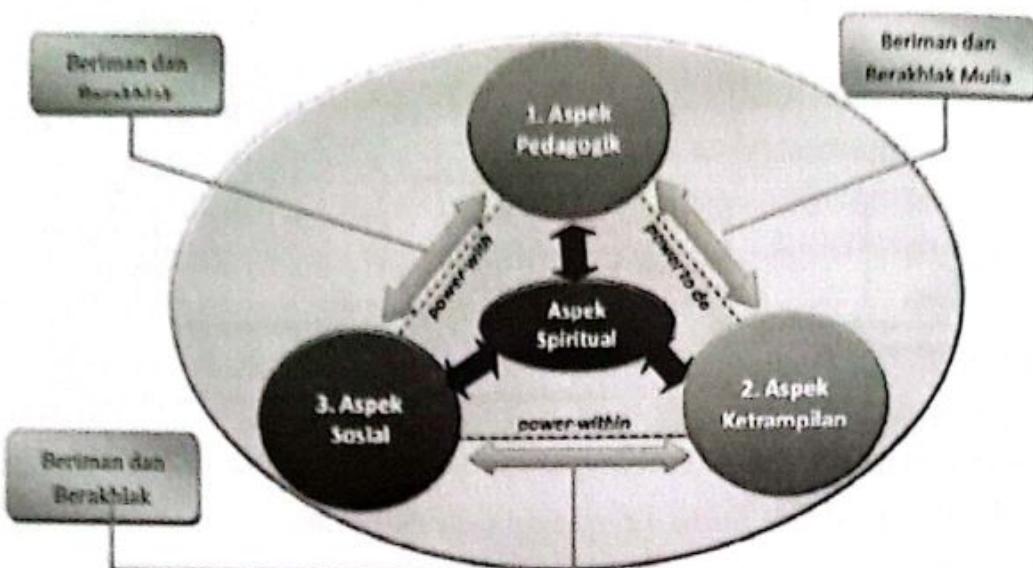


Gbr. 2: perkembangan kurikulum Indonesia

Pengelola pendidikan (pemerintah) kemudian menempatkan sekolah hanya sebagai penyelenggara pendidikan. Sekolah dituntut mematuhi petunjuk, meskipun tidak sama potensi dan kendalanya. Sekolah memiliki beban yang sama untuk memikul target nasional berupa pencapaian ranah kognitif, tanpa mempertimbangkan pemerataan pelaksanaan kurikulum, efektivitas dan efisiensi pendidikan, kualitas pendidikan (ranah psikomotorik, ranah afektif, kooperatif), dan relevansi pendidikan pada pembentukan karakter. Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu alat ukur standar kelulusan sah-sah saja di jalankan, tetapi nampak kontradiktif jika UN dipakai sebagai satu-satunya alat ukur standar kelulusan. Betapa tidak, UN yang bersifat nasional hanya menyentuh aspek kognitif saja, sementara KTSP yang bermuatan lokal dan mencakup aspek afektif, psikomotorik, dan kooperatif hilang tanpa bekas. Apa artinya proses KTSP jika pada akhirnya proses belajar ditentukan oleh hasil UN. SKL (Standar Kompetensi Lulusan) masing-masing sekolah telah ditetapkannya, karena itu berikan wewenang kepada sekolah untuk menetapkan kelulusan bagi peserta didiknya. Tetapi jika UN masih dipakai sebagai satu-satunya alat ukur kelulusan, maka sebaiknya KTSP 2006 tidak perlu dijalankan, karena pelaksanaan UN dinilai menghilangkan proses. Implementasi evaluasi berangkat dari persoalan yang ada, tidak salah bila kurikulum 1975 diberlakukan kembali dengan lebih menekankan nilai-

nilai yang berkarakter dalam cakupan nilai spiritual, sosial, pendidikan, dan ketrampilan. Berikut gambar pemberdayaan pendidikan Indonesia.

☒



Gbr. 3: roda pemberdayaan pendidikan Indonesia menuju tahun 2050

Temuan potret buram pendidikan Indonesia di atas, mendesak pihak pemerintah dan peduli pendidikan untuk memikirkan kembali wajah pendidikan yang membingungkan kepada upaya pemberdayaan. Konteks "pemberdayaan" atau *empowerment*, tepat untuk dikaitkan dengan tujuan pendidikan. *Power* yang dimaksudkan di sini dalam bingkai paradigma adalah sebagai berikut. Pertama, *power to do*, yaitu pendidikan sebagai pemberdayaan memberi daya kekuatan untuk berbuat, yaitu membantu peserta didik agar ia memiliki kemampuan berpikir, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah dan membangun berbagai ketrampilan spiritual, sosial, pendidikan dan *life skills*.

Kedua, *power-with*, yaitu pendidikan sebagai pemberdayaan memberi daya kekuatan untuk membangun kerja sama, menggali kekayaan dan potensi budaya setempat dalam sebuah bingkai wawasan kebangsaan, tanpa mesti tersentralisasi oleh ambisi dan kepentingan. Bangunan sistem pendidikan pada tataran ini mesti mengedepankan aspek *future oriented* yang berwawasan global tanpa menghilangkan aspek-aspek lokal (*think globally act locally*), dan aspek manusiawi yang pluralis, agamis, sekaligus

melenyapkan orientasi kapitalis yang berbau bisnis. Karena itu diharapkan agar pencitraan pendidikan bangsa tertuju pada penghormatan akan martabat manusia, bukan pengkerdilan dan pemandekan kreativitas peserta didik. Peserta didik tidak lagi diperalat sebagai objek, tetapi sebagai subjek pendidikan dalam berbagai dimensi kemanusiaannya. Pendidikan yang dibangun hendaknya merupakan pendidikan bagi keadilan (*education for justice*) ekonomi, dan politik, serentak pula menjadi perwujudan keadilan sosial tanpa dilumuri muatan kepentingan.

Ketiga, *power-within*, yaitu pendidikan sebagai pemberdayaan memberi kekuatan (daya bathin) dalam diri peserta didik, khususnya harga diri, kepercayaan diri dan harapan akan masa depan. Harapan masa depan pendidikan bangsa terarah pada kepastian sistem kurikulum yang berwajah Indonesia, bukan “*westernisasi*” pendidikan Indonesia sebagai hasil jiplakan. Jika peniruan paradigma pendidikan berwajah *ke-barat-an* yang kelihatan masih bahan mentah ini terus berjalan, jangan pernah mengharapkan perubahan ke arah kemajuan bangsa, karena generasi mudanya terjangkit virus “*linglung*” yang mematikan.

Implikasi potret ketidakberdayaan pendidikan Indonesia, mendesak warga bangsa khususnya pihak pengelola pendidikan, agar memikirkan kembali arah pendidikan bangsa pada karya pembentukan manusia merdeka yang humanis, matang, berbudaya, dan berkarakter. Pendidikan diharapkan sebagai pemerdekaan atas *ke-inlander-an* bangsa yang ‘ningrat’, bermartabat. Demikian halnya, pengelolaan pendidikan, wajib dikelola oleh birokrat pendidikan yang demokratis, humanis, matang, serta memiliki *compassion* dan *passion*, tanpa terseret ke dalam politisasi, dan kapitalisasi pendidikan. Dimensi inilah yang menjadi harapan pembentukan akar peradaban bangsa. Benarkah pemberlakuan kurikulum 2013 dapat menjawab ambiguitas dunia pendidikan Indonesia? Jika demikian, kita pun berharap bahwa melalui pendidikan yang benar kita selamatkan Indonesia.

IV. PENUTUP

Merubah wajah Indonesia ke arah tujuan transformatif, berarti merubah sistem termasuk di dalamnya sistem pendidikan. Kemampuan, nilai, dan sikap inilah yang perlu diupayakan dalam pengembangan melalui pendidikan. Suatu hal yang sampai sekarang terlupakan atau dilupakan adalah pendidikan sebagai investasi masa depan, maksudnya bahwa setiap

upaya pendidikan selalu mengarah pada pengembangan kemampuan, nilai, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan zaman, khususnya sistem politik demokrasi. Intinya bahwa tujuan reformasi di bidang pendidikan adalah perubahan prioritas, dari tujuan semata-mata meningkatkan kemampuan kognitif, kepada penambahan prioritas pada peningkatan mutu intuitipnya. Dengan demikian pendidikan yang integratif mengacu pada pemberdayaan manusia pada aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

Senada dengan finalitas tujuan pendidikan di atas, tujuan yang sangat perlu dan mendesak dari setiap desain pendidikan tertuju pula pada penemuan dan pengakuan kehidupan sosial (hak warga). Setiap warga dalam tataran manusia berpendidikan tentu mengetahui bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, entah dalam wujud eksistensi personal maupun dalam pengakuan sosial. Tertera pada wujud praksisnya adalah adanya pengakuan akan hak pribadi dan hak sosial, sebagai satu tatanan sosial yang saling melengkapi, sehingga arti hidup diberi porsi secara benar dalam setiap akses informasi untuk dicermati secara benar, tanpa ada kecenderungan untuk dimanipulasi.

Tanpa mengabaikan pemikiran kritis kita, seandainya kita sepikir dengan Nugroho Noto Susanto, salah seorang pakar pendidikan Indonesia yang sudah parkir, bersama mengikhtiaran bahwa: *"Perguruan Tinggi bukanlah menara gading, bukan jalan tol untuk mencapai jabatan, pekerjaan, kekuasan dan harta. Perguruan Tinggi adalah menara api yang selalu memberikan terang. Ia adalah bara yang menghangatkan mereka yang menggigil kedinginan. Bara yang membakar semangat yang loyo. Perguruan Tinggi adalah menara air yang mengairi padang gersang hidup manusia, pemuaas dahaga peziarah zaman"*.

DAFTAR PUSTAKA

Dewey, J. *Democracy and Education*. New York: The Free Press, 1909.

Dewey. *Experience and Education*. New York: University Press, 1976.

Hartoko, D. *Menjadi Manusia Pembelajar*. Jakarta: Kompas, 1989.

Makagiansar, M. *Shift in Global paradigm and The Teacher of Tomorrow*, 17th. Convention of the Asean Council of Teachers (ACT), Republic of Singapore, 5-1 Desember, 1996

Mangunwijaya, Y. B. *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang*. Surabaya : Usaha Nasional, 2007.

Naisbitt, J dan Aburdene. *Megatrend 2000. Ten New Dimensions for 1990's*. New York: William Morrow, 1990.

Sonhadji.. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Surya, H.M.. *Peningkatan Profesionalisme Guru Menghadapi Pendidikan Abad ke-21*. Jakarta: Grasindo, 1998.

Theodore, B. *Education of Power*. Boston (USA): Boston University, 1975.

Trilling, B. dan Hood, P.. *Learning, Technology, and Education Reform In the Knowledge Age or "We're Wired, Webbed, and Windowed, Now What?*. Educational Technology, May-June. 5-18, 1999.

Williams. *Planning Sucesful Employee Performance* (terj. Ramelan). Jakarta : PPM, 1989.